

Katalog : 1399013.6304

ANALISIS HASIL SURVEI KEBUTUHAN DATA



2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO KUALA**
BPS-Statistics of Barito Kuala Regency

ANALISIS HASIL SURVEI KEBUTUHAN DATA



2020

Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data Kabupaten Barito Kuala 2020

ISBN : -
No. Publikasi : 63040.2102
Katalog : 1399013.6304
Ukuran Buku : 18,5 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 76 halaman

Naskah:

Seksi Integrasi dan Pengolahan Diseminasi Statistik/IPDS
BPS Kabupaten Barito Kuala

Desain Kover:

Seksi Integrasi dan Pengolahan Diseminasi Statistik/IPDS
BPS Kabupaten Barito Kuala

Penerbit:

© BPS Kabupaten Barito Kuala

Pencetak:

Badan Pusat Statistik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau mengandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun

Penanggung Jawab:

Eddy Erwan Nopianoor, S.Si, MP

Penyunting:

Seksi IPDS Kabupaten Barito Kuala

Penulis:

Naufal Rasyid, S.Tr.Stat.

Pengolah data:

BPS RI

Naufal Rasyid, S.Tr.Stat.

Pembuat Inforafis:

Naufal Rasyid, S.Tr.Stat.

<https://baritokualakab.bps.go.id>

Kata Pengantar



Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan secara rutin tiap tahun sejak 2005, namun awalnya masih dilakukan di BPS Pusat saja. Sejak tahun 2014, lokasi pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2020, BPS kembali menyelenggarakan SKD di BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, dan 480 BPS Kabupaten/Kota. Hasil SKD 2020 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan terhadap kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih dan selamat membaca.

Marabahan, Desember 2020
Kepala BPS
Kabupaten Barito Kuala

Eddy Erwan Nopianoor, S.Si., MP

Daftar Isi



Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan dan Manfaat	4
1.3. Landasan Teori	4
1.3.1. Pelayanan Statistik Terpadu	4
1.3.2. Faktor Kepuasan Layanan.....	5
1.3.3. Konsep dan Definisi.....	6
1.4. Metodologi	7
1.4.1. Metode Sampling	7
1.4.2. Metode Pengumpulan Data	8
1.4.3. Metode Analisis Data.....	8
1.5. Sistematika Penulisan	16
1.6. Realisasi Pengumpulan Data	16
1.6.1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Unit PST.....	16
1.6.2. Target dan Realisasi Jumlah Responden SKD 2020	17
Bab 2 Segmentasi Konsumen	19
2.1. Gambaran Umum Konsumen	21
2.2. Konsumen Menurut Karakteristik.....	22
2.3. Konsumen Menurut Pemanfaatan Utama Hasil Kunjungan.....	26
2.4. Konsumen Menurut Jenis Layanan.....	27
2.5. Konsumen Menurut Fasilitas Utama untuk Memperoleh Layanan BPS.....	28
Bab 3 Analisis Kepuasan Layanan	31
3.1. Kepuasan Konsumen Terhadap Pelayanan.....	33
3.2. Kepuasan Konsumen Terhadap Akses Data	34

3.3. Kepuasan Konsumen Terhadap Sarana dan Prasarana	34
3.4. <i>Gap Analysis</i> Kepuasan Konsumen Terhadap Pelayanan BPS	35
3.5. <i>Importance and Performance Analysis</i> (IPA) Terhadap Pelayanan BPS	37
3.6. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Terhadap Pelayanan BPS	41
Bab 4 Analisis Perilaku Anti Korupsi	43
4.1. Penerapan Perilaku Anti Korupsi Pada Pelayanan BPS	45
Bab 5 Analisis Kebutuhan Data	47
5.1. Kebutuhan Data Data Menurut Level Data	49
5.2. Kebutuhan Data Menurut Periode Data.....	50
5.3. Kebutuhan Data menurut Jenis Perolehan Data.....	50
Bab 6 Analisis Kepuasan Kualitas Data	53
6.1. Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Data BPS.....	55
6.2. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Terhadap Kualitas Data BPS	56
Bab 7 Penutup.....	59
7.1. Kesimpulan	61
7.2. Saran dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan.....	63
Daftar Pustaka.....	65
Lampiran	67
Lampiran 1. Kuesioner Survei Kebutuhan Data 2020	69
Lampiran 2. Indikator Analisis Segmentasi Utama.....	73

Daftar Tabel



		Halaman
Tabel 1.1	Langkah-Langkah Penghitungan IKK.....	13
Tabel 1.2	Kalsifikasi Kualitas Pelayanan	14
Tabel 1.3	Jumlah dan Persentase Wilayah PST yang Memenuhi Sarana dan Prasarana	17
Tabel 1.4	Realisasi Jumlah Responden SKD 2020 Menurut Wilayah PST BPS di Kabupaten Hulu Sungai Selat	18
Tabel 3.1	Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan, dan Gap Pelayanan Menurut Atribut Pelayanan di PST BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan	37
Tabel 3.2	Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan, dan Tingkat Kesesuaian Menurut Atribut Pelayanan di PST BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan	38

Daftar Gambar



	Halaman
Gambar 1.1	Diagram <i>Cartesius Impotance and Performance Analysis</i> 11
Gambar 2.1	Persentase Konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala yang Menggunakan Data BPS Sebagai Rujukan Utama 21
Gambar 2.2	Persentase Konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala Menurut Kelompok Umur* 22
Gambar 2.3	Persentase Konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala Menurut Jenis Kelamin 23
Gambar 2.4	Persentase Konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 24
Gambar 2.5	Persentase Konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala Menurut Pekerjaan Utama 25
Gambar 2.6	Persentase Konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala Menurut Instansi/Institusi 26
Gambar 2.7	Persentase Konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala Menurut Pemanfaatan Utama Hasil Kunjungan..... 27
Gambar 2.8	Persentase Konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala Menurut Jenis Layanan..... 28
Gambar 2.9	Persentase Konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala Menurut Fasilitas Utama untuk Mendapatkan Layanan BPS 29
Gambar 3.1	Persentase Kepuasan Konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala Terhadap Pelayanan 33
Gambar 3.2	Persentase Kepuasan Konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala Terhadap Akses Data..... 34
Gambar 3.3	Persentase Kepuasan Konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala Terhadap Sarana dan Prasarana 35
Gambar 3.5	Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan, dan Gap Pelayanan BPS di PST BPS Kabupaten Hulu Sungai 36

Halaman

Gambar 3.6	<i>Importance and Performance Analysis (IPA) Pelayanan di PST BPS Kabupaten Barito Kuala</i>	39
Gambar 5.1	Persentase Pencarian Data di PST BPS Kabupaten Barito Kuala Menurut Level Data	50
Gambar 5.2	Persentase Pencarian Data di PST BPS Kabupaten Barito Kuala Menurut Periode Data	50
Gambar 5.3	Persentase Pencarian Data di PST BPS Kabupaetn Barito Kuala Menurut Perolehannya	51
Gambar 6.1	Persentase Kepuasan Konsumen Terhadap Data yang Diperoleh dari Penyedia Data BPS Kabupaten Barito Kuala	55
Gambar 6.2	Persentase Kepuasan Konsumen Terhadap Data yang Diperoleh dari Penyedia Data BPS Kabupaten Barito Kuala Menurut Aspek Kualitas Data	56

<https://baritokualakab.bps.go.id>

Daftar Lampiran



	Halaman
Lampiran 1	Kuesioner Survei Kebutuhan Data 2020 67
Lampiran 2	Indikator Analisis Segmentasi Utama 71
a.	Persentase konsumen menurut Wilayah PST dan kelompok Umur 71
b.	Persentase konsumen menurut Wilayah PST dan Jenis Kelamin 71
c.	Persentase konsumen menurut Wilayah PST dan Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan 71
d.	Persentase konsumen menurut Wilayah PST dan Pekerjaan Utama 72
e.	Persentase konsumen menurut Wilayah PST dan Intansi/institusi 72
f.	Persentase konsumen menurut Wilayah PST dan Pemanfaatan Hasil Kunjungan 72
g.	Persentase konsumen menurut Wilayah PST dan Jenis Layanan yang digunakan 73
h.	Persentase konsumen menurut Wilayah PST dan Fasilitas Utama yang Digunakan untuk Memperoleh Data 73

1



PENDAHULUAN



Lokus Penelitian

BPS Kabupaten Barito Kuala



Metode Pengumpulan Data

1. PAPI
2. CAPI (email, PST, link)



Metode Analisis Data

1. Tabulasi Silang
2. Analisis Kesenjangan
3. Importance and Performance Analysis (IPA)



Hasil

1. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK)
2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)





Bab 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan publik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pemantauan pelayanan publik secara berkesinambungan, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan standar pelayanan serta harapan dan kebutuhan masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan badan pelayanan publik yang memberikan pelayanan melalui penyediaan data dan informasi statistik. Tugas dan tanggung jawab di bidang statistik tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Dalam menyebarkan data dan informasi statistik, BPS menyediakan unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota.

Pemantauan pelayanan di PST BPS perlu dilakukan untuk peningkatan kualitas data dan informasi statistik serta pelayanan. Oleh sebab itu, BPS merasa perlu menyelenggarakan suatu survei untuk mendapatkan bahan evaluasi mengenai kebutuhan dan kepuasan konsumen terhadap data dan informasi statistik serta pelayanan. Survei tersebut adalah Survei Kebutuhan Data.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang dirancang dan dilakukan oleh BPS untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. SKD pertama kali dilaksanakan tahun 2005 dan hanya dilakukan di BPS Pusat. Tahun 2008, SKD dilakukan di BPS Pusat dan lima BPS Provinsi sebagai uji coba (*pilot project*). Pada

tahun 2009 dan 2010, SKD dilaksanakan di BPS Pusat dan sebelas BPS Provinsi. Tahun 2011 – 2013, SKD dilakukan di BPS Pusat dan 33 BPS Provinsi. Sejak tahun 2014, lokasi pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS Kabupaten/Kota.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Secara umum, tujuan pelaksanaan SKD 2020 adalah mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik. Tujuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BPS No. 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Survei Kebutuhan Data di Lingkungan Badan Pusat Statistik. Selain itu, pelaksanaan SKD 2020 juga dapat memberikan indikasi kualitas pelayanan BPS. Hal ini ditujukan untuk menjawab amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Hasil SKD 2020 dapat dimanfaatkan oleh BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota untuk mengidentifikasi beberapa isu, antara lain:

- a. Kebutuhan data dari konsumen
- b. Kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan publik
- c. Rekomendasi perbaikan pelayanan publik
- d. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK)
- e. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- f. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

1.3. Landasan Teori

1.3.1. Pelayanan Statistik Terpadu

Data hasil kegiatan sensus atau survei harus disampaikan kepada masyarakat sebagai konsumen. Penyebarluasan data BPS kepada masyarakat menjadi sorotan utama pihak luar, baik oleh instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum. Oleh sebab itu, penyajian dan penyebarluasan data perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Pintu gerbang penyebarluasan data BPS adalah unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST). Pelayanan yang diberikan melalui unit PST bersifat satu pintu atau *one gate service*. Keberadaan unit PST BPS diharapkan mampu mempermudah

konsumen dalam mencari data dan informasi statistik. Pelayanan yang diberikan oleh BPS tidak hanya dilakukan dengan tatap muka atau datang langsung ke unit PST BPS, tetapi dapat juga dilakukan tanpa tatap muka baik melalui *website* BPS, aplikasi AllStat BPS (berbasis Android dan iOS), telepon, faksimili, *e-mail*, maupun surat.

Fungsi pelayanan di BPS Pusat berada pada Direktorat Diseminasi Statistik. Sementara itu, fungsi pelayanan di BPS Provinsi berada pada Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik dan fungsi pelayanan di BPS Kabupaten/Kota berada pada Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik. PST memiliki enam jenis layanan, yaitu layanan pustaka tercetak, layanan pustaka digital, layanan penjualan publikasi, layanan data mikro, layanan konsultasi data statistik, serta layanan rekomendasi kegiatan statistik.

1.3.2. Faktor Kepuasan Layanan

Parasuraman (2001) menyatakan bahwa terdapat lima unsur penting yang menentukan kepuasan yaitu *responsiveness, assurance, tangible, empathy, dan reliability*. Kelima unsur tersebut merupakan unsur penting yang diukur sebagai kualitas pelayanan (*service quality*). Konsep dari kualitas pelayanan adalah membentuk sikap dan perilaku dari penyedia layanan agar dapat memberikan pelayanan prima.

a. *Responsiveness* (daya tanggap)

Daya tanggap merupakan unsur yang menuntut adanya kemampuan pemberi layanan untuk segera memberikan pelayanan atas kebutuhan pengguna layanan sesuai dengan tingkat penyerapan, pengertian, dan ketidaksesuaian atas berbagai bentuk layanan yang tidak diketahui. Oleh sebab itu, pemberi layanan perlu memberikan penjelasan yang bijaksana dan mendetail, sehingga pengguna layanan mendapatkan respon positif.

b. *Assurances* (jaminan)

Jaminan merupakan bentuk kepastian dari suatu unit pelayanan. Unsur ini sangat ditentukan oleh jaminan dari pemberi layanan, sehingga

orang yang menerima layanan merasa puas dan yakin bahwa segala bentuk pelayanan yang dilakukan tersebut tuntas dan sesuai dengan kecepatan, ketepatan, kemudahan, kelancaran, dan kualitas pelayanan yang dijamin.

c. *Tangible* (fisik)

Unsur fisik merupakan bentuk aktualisasi nyata yang dapat terlihat atau digunakan oleh pemberi layanan guna membantu pelaksanaan pelayanan. Unsur fisik dapat berupa penampilan fisik petugas, sarana prasarana fisik, serta keadaan lingkungan sekitar.

d. *Empathy* (empati)

Unsur empati dalam suatu pelayanan ditunjukkan dengan adanya suatu perhatian, keseriusan, simpatisme, pengertian, dan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelayanan. Hal tersebut bertujuan untuk mengembangkan dan melakukan aktivitas pelayanan sesuai dengan tingkat pengertian dan pemahaman dari masing-masing pihak tersebut.

e. *Reliability* (keandalan)

Unsur keandalan dalam pelayanan menuntut setiap petugas memiliki kemampuan, keahlian, kemandirian, penguasaan, dan profesionalisme kerja yang tinggi. Oleh karena itu, aktivitas yang dikerjakan menghasilkan bentuk pelayanan yang memuaskan tanpa ada keluhan dan kesan yang berlebihan atas pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

1.3.3. Konsep dan Definisi

- a. Responden adalah objek SKD atau pemberi jawaban atas pertanyaan dalam kuesioner SKD. Responden SKD 2020 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit PST BPS sejak 1 Januari 2020 sampai periode akhir pencacahan.
- b. Konsumen adalah pengguna data dan/atau pengguna layanan PST BPS yang menjadi responden SKD.

- c. Orang-data adalah pasangan satu-satu antara setiap konsumen dengan jenis data yang dicari.
- d. BPS adalah Badan Pusat Statistik, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
- e. BPS Pusat adalah instansi vertikal BPS di pusat.
- f. BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS di provinsi.
- g. BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS di kabupaten/kota.
- h. Wilayah nasional adalah gabungan BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota.
- i. Wilayah PST atau unit PST adalah unit pelayanan statistik terpadu di BPS.
- j. Wilayah penyedia data adalah unit kerja BPS yang menerbitkan/menyediakan data.
- k. Ragam data adalah pengelompokan jenis data menurut kedeputian yang ada di BPS pusat yang meliputi sosial, produksi, distribusi dan jasa, neraca dan analisis statistik, metodologi dan informasi statistik, serta lainnya.
- l. Level data adalah tingkatan data berdasarkan wilayah yang meliputi nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, individu, dan lainnya.
- m. Periode data adalah rentang waktu suatu data dikumpulkan yang meliputi sepuluh tahunan, lima tahunan, tiga tahunan, tahunan, semesteran, triwulanan, bulanan, mingguan, harian, dan lainnya.

1.4. Metodologi

Dalam penjelasan berikut, metodologi dibedakan ke dalam tiga kelompok, yaitu metode sampling, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

1.4.1. Metode Sampling

SKD 2020 dilakukan dengan metode non probability sampling yaitu teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Adapun tekniknya adalah quota sampling yaitu

teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah/kuota yang diinginkan atau jumlah subjek yang akan diselidiki ditetapkan terlebih dahulu.

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data SKD 2020 dilakukan pada Juni–September 2020 oleh responden dengan mengisi kuesioner sendiri (*self enumeration*). Instrumen yang digunakan adalah kuesioner VKD20. Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu pencacahan manual dan elektronik (*online*). Pencacahan manual merupakan pencacahan yang dilakukan terhadap responden dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk *hardcopy* atau yang dikenal dengan istilah PAPI (*Pencil and Paper Interview*). Pencacahan elektronik merupakan pencacahan yang dilakukan terhadap responden melalui aplikasi berbasis *website* atau yang dikenal dengan istilah CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*). Terdapat 3 (tiga) metode pencacahan elektronik SKD 2020, yaitu:

- 1) *Online E-mail*, yaitu responden melakukan pengisian kuesioner VKD20 melalui *link* yang dikirimkan melalui *e-mail*.
- 2) *Online PST*, yaitu responden melakukan pengisian kuesioner VKD20 melalui form entri pada *web browser* komputer di unit PST.
- 3) *Online Link*, yaitu responden melakukan pengisian kuesioner VKD20 melalui *link* yang diperoleh dari aplikasi layanan statistik BPS.

1.4.3. Metode Analisis Data

Analisis dilakukan terhadap karakteristik konsumen, kepuasan konsumen terhadap pelayanan, persepsi konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa bentuk analisis deskriptif yang digunakan antara lain: analisis tabulasi silang, analisis kesenjangan (*gap analysis*),

Importance and Performance Analysis (IPA), Customer Satisfaction Index (CSI) atau Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Ruang lingkup analisis hasil SKD 2020 dalam publikasi ini adalah PST BPS Kabupaten Barito Kuala.

a. Analisis Tabulasi Silang

Tabulasi silang merupakan tabel yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih variabel dapat diidentifikasi dengan tabulasi silang. Tabulasi silang akan membantu dalam memahami baik profil konsumen, kebutuhan dan ketersediaan data, maupun masalah lain.

b. Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*)

Gap Analysis adalah analisis mengenai kesenjangan antara harapan (tingkat kepentingan) konsumen dengan kinerja (tingkat kepuasan) pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan yang bersangkutan. Pada analisis kesenjangan, harapan konsumen akan dibandingkan dengan kinerja pelayanan yang diberikan (*delivered*) oleh unit pelayanan. Nilai kesenjangan atau gap diperoleh dari selisih antara tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan pengguna layanan pada setiap rincian pelayanan. Gap positif akan diperoleh apabila tingkat kepuasan lebih besar dari tingkat kepentingan, sedangkan gap negatif akan diperoleh apabila tingkat kepuasan lebih kecil dari tingkat kepentingan. Pada gap positif, semakin besar nilai gap, konsumen semakin puas. Sebaliknya, semakin kecil nilai gap negatif, konsumen semakin tidak puas.

c. *Importance and Performance Analysis (IPA)*

Metode IPA dikenal pula dengan istilah analisis kuadran (*quadrant analysis*). Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Martilla dan James (1977). Tujuan metode ini adalah untuk mengukur hubungan antara persepsi konsumen dengan prioritas peningkatan kualitas produk/jasa (Brandt, 2000 dan Latu, 2000). IPA mempunyai fungsi utama untuk menampilkan informasi tentang faktor-faktor pelayanan yang sangat mempengaruhi kepuasan dan

peningkatan pelayanan (*improvement*). IPA telah diterima secara umum dan digunakan pada berbagai bidang kajian karena kemudahan untuk diterapkan dan tampilan hasil analisis yang memudahkan usulan perbaikan kinerja (Martinez, 2003).

Dalam IPA, terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu:

1) Tingkat Kesesuaian

Penghitungan tingkat kesesuaian digunakan untuk mengetahui seberapa besar konsumen merasa puas terhadap kinerja pelayanan. Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan.

Tingkat kesesuaian dihitung menggunakan rumus berikut:

$$TK = \frac{\bar{x}}{\bar{y}} \times 100\%$$

dengan:

TK = Tingkat kesesuaian

\bar{x} = rata-rata tingkat kepuasan

\bar{y} = rata-rata tingkat kepentingan

Kriteria penilaian tingkat kesesuaian adalah:

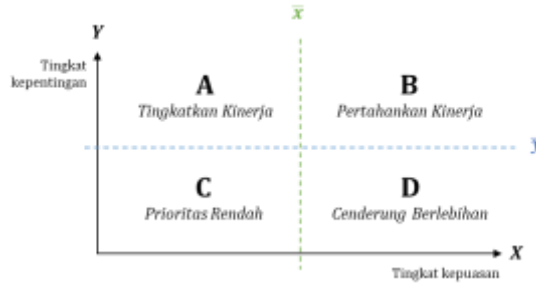
TK > 100% : kinerja pelayanan melebihi harapan konsumen

TK = 100% : kinerja pelayanan sesuai harapan konsumen

TK < 100% : kinerja pelayanan belum sesuai harapan konsumen

2) Diagram Cartesius

Diagram cartesius digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tingkat kepentingan (*importance*) dan tingkat kepuasan (*performance*). Pada Gambar 1.1, diagram cartesius dibagi atas empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik (\bar{x}, \bar{y}) dengan \bar{x} adalah rata-rata tingkat kepuasan dan \bar{y} adalah rata-rata tingkat kepentingan.



Gambar 1.1. Diagram *Cartesius Importance and Performance Analysis*

Keempat kuadran tersebut memiliki arti sebagai berikut:

- Kuadran A (*high importance & low performance*)
 Kuadran “Tingkatkan Kinerja” terletak di sebelah kiri atas, yang berarti prioritas utama unit pelayanan adalah peningkatan kinerja (*performance improvement*). Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang dianggap penting oleh pengguna layanan, tetapi pada kenyataannya kinerja atribut pelayanan tersebut belum sesuai dengan harapan para pengguna layanan. Kinerja atribut pelayanan tersebut lebih rendah dari harapan pengguna layanan terhadap atribut pelayanan tersebut.
 Atribut pelayanan yang terdapat dalam kuadran ini harus lebih ditingkatkan agar dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan/pengguna layanan. Cara yang dapat dilakukan adalah perbaikan secara terus menerus terhadap kinerja, sehingga *performance* dari atribut pelayanan yang ada dalam kuadran ini akan meningkat.
- Kuadran B (*high importance & high performance*)
 Kuadran “Pertahankan Kinerja” terletak di sebelah kanan atas, yang berarti kinerja sudah dapat memenuhi harapan pengguna layanan dan diusahakan untuk mempertahankan kinerja tersebut. Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang dianggap penting oleh pengguna layanan dan kinerja atribut pelayanan dianggap sudah sesuai dengan yang dirasakan oleh pengguna layanan, sehingga tingkat kepuasannya relatif tinggi. Atribut pelayanan yang termasuk dalam kuadran ini harus tetap dipertahankan.
- Kuadran C (*low importance & low performance*)

Kuadran “Prioritas Rendah” terletak di sebelah kiri bawah, yang berarti prioritas rendah. Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang dianggap kurang penting oleh pengguna layanan dan pada kenyataannya kinerja atribut pelayanan tersebut tidak terlalu istimewa.

Peningkatan kinerja atribut pelayanan yang termasuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh pemangku kepentingan/pengguna layanan sangat kecil.

- Kuadran D (*low importance & high performance*)

Kuadran “Cenderung Berlebihan” terletak di sebelah kanan bawah, yang berarti kinerjanya berlebihan sementara pengguna layanan menganggap kurang penting. Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang dianggap kurang penting oleh pemangku kepentingan/pengguna layanan. Atribut pelayanan yang termasuk dalam kuadran ini dapat dikurangi agar satuan kerja pemilik indeks dapat melakukan penghematan sumber daya.

d. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK)

Indeks Kepuasan Konsumen (IKK)

IKK atau *Customer Satisfaction Index* (CSI) merupakan ukuran untuk menilai tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS Kabupaten Barito Kuala dan data yang dihasilkan oleh unit penghasil data BPS Kabupaten Barito Kuala. Aspek yang dihitung adalah kualitas pelayanan dan kualitas data.

IKK kualitas pelayanan diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 13 atribut pelayanan (variabel) yang ada di Blok II kuesioner VKD20. IKK kualitas data diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 4 aspek kualitas data, yaitu kualitas secara umum, kelengkapan, akurasi, dan kemutakhiran. Adapun langkah-langkah penghitungan IKK tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Langkah-Langkah Penghitungan IKK

Langkah	IKK Kualitas Pelayanan	IKK Kualitas Data
1. Menghitung Penimbang	<p>Penimbang diperoleh dengan cara membagi rata-rata tingkat kepentingan masing-masing atribut pelayanan dengan jumlah rata-rata tingkat kepentingan seluruh atribut pelayanan. Rumus penimbang:</p> $w_i = \frac{\bar{y}_i}{\sum_{i=1}^{13} \bar{y}_i}$ <p>dengan: w_i = penimbang atribut pelayanan ke-i, $\sum_{i=1}^{13} w_i = 1$ \bar{y}_i = rata-rata tingkat kepentingan atribut pelayanan ke-i $i = 1, 2, \dots, 13$</p>	<p>Tingkat kepentingan terhadap masing-masing aspek kualitas data diasumsikan sama, yaitu skala maksimum penilaian sebesar 10. Oleh karena itu, nilai penimbang pada IKK kualitas data menjadi konstan, yaitu</p> $w = \frac{y}{\sum_{i=1}^4 \bar{y}_i} = \frac{10}{40}$ <p>dengan</p> $\sum_{i=1}^4 w_i = 1$
2. Menghitung Rata-Rata Tertimbang Skor Kepuasan (IKK')	<p>IKK' diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan berdasarkan 13 atribut pelayanan. Rumus IKK':</p> $IKK' = \frac{\sum_{i=1}^{13} w_i \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^{13} w_i} = \sum_{i=1}^{13} w_i \bar{x}_i$ <p>dengan: \bar{x}_i = rata-rata tingkat kepuasan atribut pelayanan ke-i</p>	<p>IKK' diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan berdasarkan 4 aspek kualitas data. Rumus IKK';</p> $IKK' = \frac{\sum_{i=1}^4 w \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^4 w_i} = \sum_{i=1}^4 \frac{10}{40} \bar{x}_i$ <p>dengan: \bar{x}_i = rata-rata tingkat kepuasan aspek kualitas data ke-i</p>
3. Menghitung IKK	<p>Penghitungan IKK' menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen. IKK merupakan hasil konversi nilai IKK' menggunakan rumus berikut:</p> $IKK = \frac{IKK'}{\text{skala maksimum penilaian}} \times 100 = \frac{IKK'}{10} \times 100$	

Nilai IKK diklasifikasikan menjadi 4 kategori seperti pada Tabel 1.2. Klasifikasi nilai IKK Tahun 2020 berbeda dengan klasifikasi pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, klasifikasi nilai didasarkan pada PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel 1.2. Klasifikasi Kualitas Pelayanan

Nilai IKK	Kualitas Pelayanan
25,00 - 64,99	Tidak baik
65,00 - 76,60	Kurang baik
76,61 - 88,30	Baik
88,31 - 100,00	Sangat Baik

Sumber: PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

e. Persentase Konsumen yang Puas

Selain IKK, indikator kepuasan konsumen juga disajikan dalam bentuk persentase konsumen yang puas. Indikator tersebut antara lain meliputi persentase konsumen yang puas terhadap kualitas data, kelengkapan data, akurasi data, kemutakhiran data, akses data, sarana dan prasarana PST, dan kualitas pelayanan PST.

Skala pengukuran yang digunakan pada SKD 2020 adalah 1 – 10, dimana konsumen dikatakan puas jika menjawab di atas 7,66 (berdasarkan Tabel 1.2). Konsep penghitungan ini berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana konsumen dikatakan puas jika memberikan penilaian di atas 5,5 (setengah dari nilai median). Oleh karena itu, jika akan membandingkan indikator persentase konsumen yang puas antara tahun 2020 dengan tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian rumus yang sama terlebih dahulu.

f. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

IPAK digunakan untuk mendapatkan gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan di PST BPS Kabupaten Barito Kuala. Aspek yang dihitung adalah penerapan perilaku anti korupsi, meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar, dan tidak ada praktik percaloan. Nilai IPAK diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 4 atribut anti korupsi (variabel) yang ada di Blok II kuesioner VKD20.

Langkah-langkah penghitungan IPAK adalah:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan cara membagi rata-rata tingkat kepentingan masing-masing atribut anti korupsi dengan jumlah rata-rata tingkat kepentingan seluruh atribut anti korupsi.

Rumus penimbang:

$$w_i = \frac{\bar{y}_i}{\sum_{i=1}^4 \bar{y}_i} \times 100\%$$

dengan:

w_i = penimbang atribut pelayanan ke-i, $\sum_{i=1}^4 w_i = 1$

\bar{y}_i = rata-rata tingkat kepentingan atribut anti korupsi ke-i

i = 1, 2, 3, 4

2. Menghitung Rata-Rata Tertimbang Skor Kepuasan (IPAK')

IPAK' diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan berdasarkan 4 atribut anti korupsi.

Rumus IPAK':

$$IPAK' = \frac{\sum_{i=1}^4 w_i \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^4 w_i} = \sum_{i=1}^4 w_i \bar{x}_i$$

dengan:

\bar{x}_i = rata-rata tingkat kepuasan atribut anti korupsi ke-i

3. Menghitung IPAK

Penghitungan IPAK' menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi. IPAK merupakan hasil konversi nilai IPAK' menggunakan rumus berikut:

$$IPAK = \frac{IPAK'}{\text{skala maksimum penilaian}} \times 100 = \frac{IPAK'}{10} \times 100$$

Nilai IPAK semakin mendekati 100 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi semakin diterapkan dengan sangat baik pada PST BPS.

1.5. Sistematika Penulisan

Publikasi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan dan manfaat, landasan teori, metodologi, sistematika penulisan, serta realisasi pengumpulan data SKD 2020.

Bab 2 Segmentasi Konsumen, berisi analisis mengenai karakteristik konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala yang menjadi responden SKD 2020 berdasarkan Blok I VKD20.

Bab 3 Analisis Kepuasan Layanan, berisi analisis mengenai kepuasan terhadap layanan di PST BPS Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Blok II VKD20.

Bab 4 Analisis Perilaku Anti Korupsi, berisi analisis mengenai persepsi terhadap perilaku anti korupsi pada layanan di PST BPS Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Blok II VKD20.

Bab 5 Analisis Kebutuhan Data, berisi analisis mengenai data di PST BPS Kabupaten Barito Kuala yang dibutuhkan oleh konsumen berdasarkan Blok III VKD20.

Bab 6 Analisis Kepuasan Kualitas Data, berisi analisis mengenai kepuasan terhadap kualitas data di PST BPS Kabupaten Barito Kuala yang didapatkan oleh konsumen berdasarkan Blok III VKD20.

Bab 7 Penutup, berisi kesimpulan hasil SKD 2020 serta saran terhadap pelaksanaan SKD 2021 dan rekomendasi perbaikan layanan di PST BPS Kabupaten Barito Kuala.

1.6. Realisasi Pengumpulan Data

SKD 2020 dilakukan di 515 wilayah PST yang terdiri dari 1 PST BPS Pusat, 34 PST BPS Provinsi, dan 480 PST BPS Kabupaten/Kota.

1.6.1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Unit PST

Direktorat Diseminasi Statistik melakukan pembinaan dan pengembangan secara berkesinambungan terhadap unit PST di BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota. Hal tersebut dilakukan mulai dari pembinaan sumber daya

manusia, pengembangan sarana dan prasarana, sampai dengan pengembangan aplikasi PST. Hasil pembinaan dan pengembangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan data dan informasi statistik di seluruh unit PST.

Identifikasi sarana dan prasarana di unit PST pada SKD 2020, meliputi:

1. Informasi pelayanan
2. Maklumat pelayanan
3. *Wifi*
4. Petugas pelayanan
5. Ruang pelayanan
6. Komputer
7. Sarana pengaduan

Tabel 1.3. Jumlah Sarana dan Prasarana di Wilayah PST Kabupaten Barito Kuala

Wilayah PST BPS	Jumlah PST	Sarana dan Prasarana						
		Informasi Pelayanan	Maklumat Pelayanan	<i>Wifi</i>	Informasi Petugas	Ruang Pelayanan	Komputer	Sarana Pengaduan
Kabupaten Barito Kuala	1	1	1	1	-	1	1	1

Tabel 1.3 menjelaskan pemenuhan sarana dan prasarana di PST BPS Kabupaten Barito Kuala. Pemenuhan sarana dan prasarana di PST BPS Kabupaten Barito Kuala sudah cukup baik. Sarana dan prasarana tersebut sudah sebagian besar terdapat di PST BPS.

1.6.2. Target dan Realisasi Jumlah Responden SKD 2020

Dalam SKD 2020, masing-masing PST BPS memiliki target jumlah responden yang harus dipenuhi. PST BPS Pusat memiliki target responden paling banyak, yaitu 150 responden. Target jumlah responden untuk PST BPS Provinsi adalah 70 responden. Sementara itu, PST BPS Kabupaten/Kota ditargetkan memperoleh responden sebanyak 30 responden.

Pelaksanaan kegiatan SKD 2020 secara keseluruhan berjalan dengan baik. Secara nasional jumlah responden telah memenuhi target. BPS di Provinsi Kalimantan Selatan baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah memenuhi target sampel. Adapun rincian realisasi responden berdasarkan wilayah PST BPS di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4. Realisasi Jumlah Responden SKD 2020 Menurut Wilayah PST BPS di Kabupaten Barito Kuala

Wilayah PST BPS	Jumlah Resp.
Kabupaten Barito Kuala	31

<https://baritokualakab.bps.go.id>

2

SEGMENTASI KONSUMEN



Jenis Kelamin



48,39%



51,61%

90,32% konsumen menggunakan data BPS sebagai rujukan utama

51,61% konsumen berasal dari Pemerintah Daerah

Pendidikan



45,16%
D4/S1

Pekerjaan Utama

61,29%
PNS/TNI/Polri



60,87% konsumen menggunakan jenis layanan **pustaka digital**

Fasilitas Utama



45,16%
Website BPS





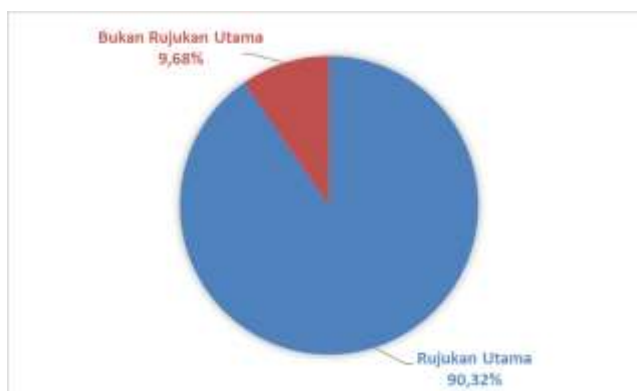
Bab 2 Segmentasi Konsumen

Bab ini menjabarkan analisis mengenai segmentasi konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala. Segmentasi tersebut meliputi karakteristik konsumen dan penggunaan layanan BPS Kabupaten Barito Kuala oleh konsumen. Unit analisis yang digunakan adalah konsumen dengan satuan orang.

2.1. Gambaran Umum Konsumen

Data dan informasi statistik yang dihasilkan oleh BPS, baik yang diperoleh dari sensus, survei, maupun kompilasi produk administrasi, sangat diminati oleh para konsumen. Data dan informasi tersebut dimanfaatkan oleh konsumen untuk berbagai kebutuhan. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BPS dalam menyajikan data yang lengkap, akurat, dan mutakhir.

Kecenderungan konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala dalam menggunakan data BPS sebagai rujukan utama dapat dilihat pada Gambar 2.1. Sebagian besar konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala menggunakan data BPS sebagai rujukan utama dengan persentase mencapai 90,32%.



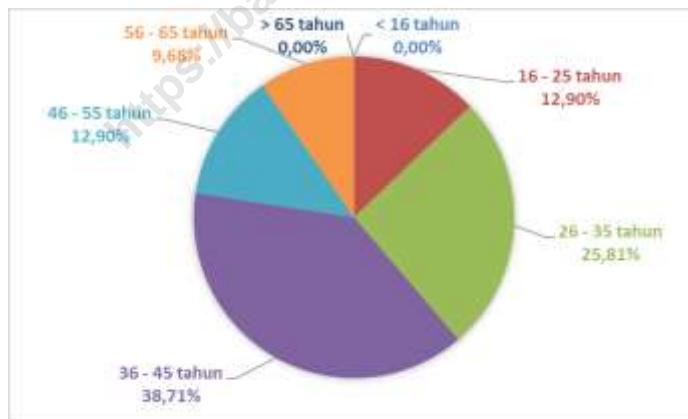
Gambar 2.1. Persentase Konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala yang Menggunakan Data BPS Sebagai Rujukan Utama

2.2. Konsumen Menurut Karakteristik

Pada bagian ini, dibahas mengenai segmentasi konsumen menurut karakteristiknya. Karakteristik konsumen yang dianalisis dibagi menjadi lima, yaitu kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir yang ditamatkan, pekerjaan utama, dan instansi/institusi.

Kelompok Umur

Berdasarkan Gambar 2.2, konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala didominasi oleh konsumen berumur 16-65 tahun yang terbagi menjadi empat kelompok umur. Konsumen terbanyak adalah konsumen berumur 36-45 tahun (38,71%), disusul konsumen berumur 26-35 tahun (25,81%), konsumen berumur 16-25 tahun berjumlah sama dengan 46-55 tahun (12,90%) dan konsumen berumur 56-65 tahun (9,68%). Dominasi ini dapat dipengaruhi oleh faktor usia produktif (15-64 tahun), yaitu orang yang masih dapat belajar dan bekerja dengan baik untuk menghasilkan produk atau jasa.



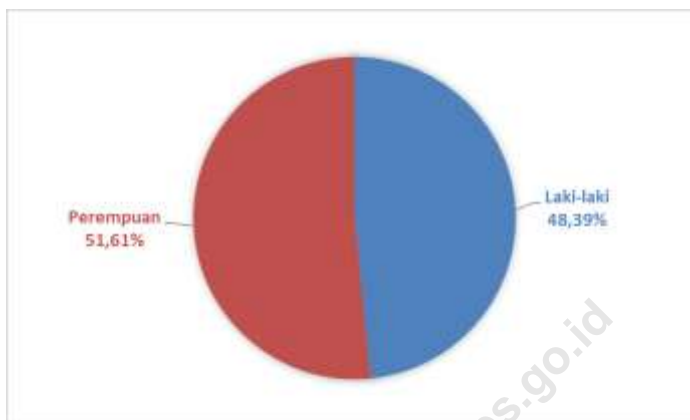
Gambar 2.2. Persentase Konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala Menurut Kelompok Umur*

*Customer Satisfaction Index, Stratford-On-Avon District Council, April 2012

Jenis Kelamin

Gambar 2.3 menunjukkan persentase konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala menurut jenis kelamin. Persentase Konsumen perempuan di PST BPS

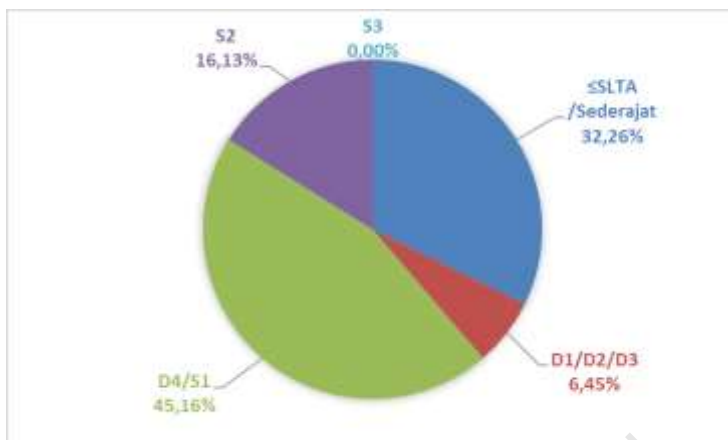
Kabupaten Barito Kuala adalah sebesar 51,61%. Sementara itu, 48,39% konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala adalah laki-laki.



Gambar 2.3. Persentase Konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala Menurut Jenis Kelamin

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Karakteristik konsumen menurut tingkat pendidikan penting diketahui. Pada umumnya, semakin tinggi tingkat pendidikan, konsumen akan semakin melek data. Pada SKD 2020, karakteristik konsumen menurut pendidikan terakhir yang ditamatkan dikelompokkan menjadi lima, yaitu \leq SLTA/ sederajat, D1/D2/D3, D4/S1, S2, dan S3. Berdasarkan Gambar 2.4, konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala didominasi oleh konsumen dengan tingkat pendidikan D4/S1 (45,16%). Konsumen terbanyak selanjutnya adalah konsumen dengan tingkat pendidikan kurang dari sama dengan SLTA/ sederajat (32,26%). Sementara itu, tidak terdapat konsumen dengan tingkat pendidikan S3.

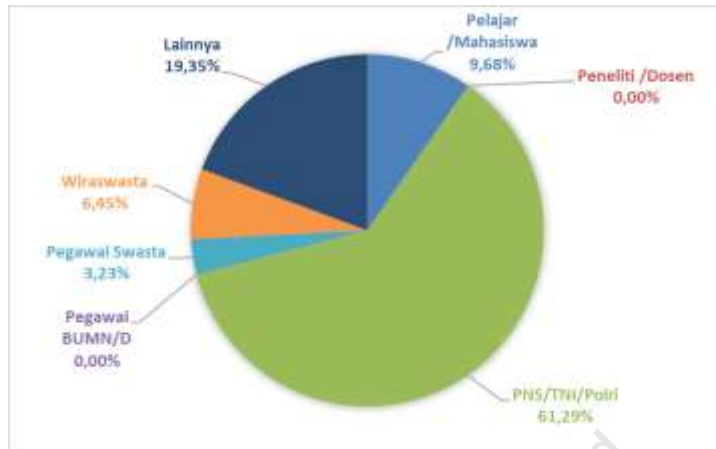


Gambar 2.4. Persentase Konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pekerjaan Utama

Pada SKD 2020, pekerjaan utama dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu pelajar/mahasiswa, peneliti/dosen, PNS/TNI/Polri, pegawai BUMN/D, pegawai swasta, wiraswasta, dan lainnya. Pekerjaan utama yang dicakup dalam SKD 2020 adalah pekerjaan utama konsumen pada saat pencacahan. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil kunjungan yang dilakukan oleh konsumen tersebut.

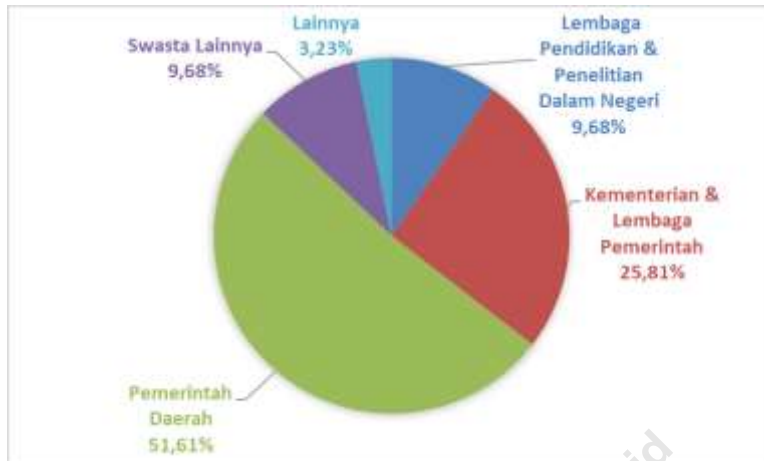
Berdasarkan Gambar 2.5, sebagian besar konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala adalah PNS/TNI/Polri (61,29%). Adapun konsumen dengan pekerjaan utama sebagai Pelajar/Mahasiswa memiliki persentase sebesar 9,68%. Konsumen yang bekerja sebagai Wiraswasta sebesar 6,45% dan Pegawai Swasta sebesar 3,23%.



Gambar 2.5. Persentase Konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala Menurut Pekerjaan Utama

Instansi/Institusi

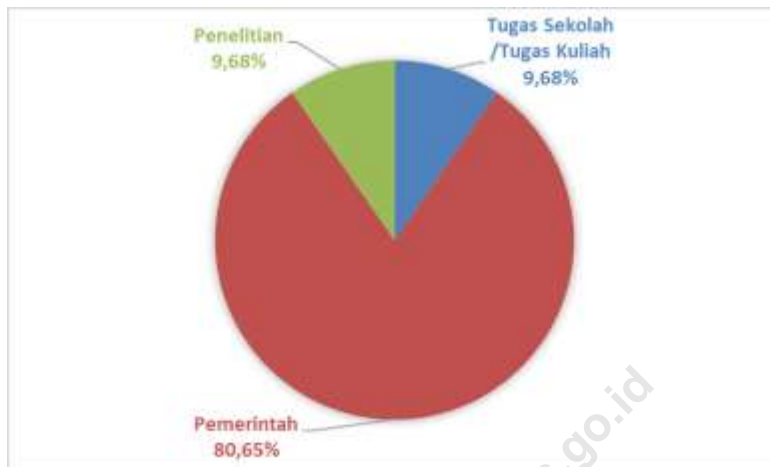
Konsumen pada SKD 2020 dapat dipilah menurut instansi/institusi tempat pekerjaan utama. Berdasarkan Gambar 2.6, sebagian besar konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala berasal dari Pemerintah Daerah (51,61%). Konsumen yang bekerja di Kementerian & Lembaga Pemerintah berada pada posisi kedua dengan persentase sebesar 25,81%. Sementara itu, konsumen yang bekerja di Lembaga Pendidikan & Penelitian Dalam Negeri memiliki persentase yang sama dengan Swasta Lainnya sebesar 9,68%.



Gambar 2.6. Persentase Konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala Menurut Instansi/Institusi

2.3. Konsumen Menurut Pemanfaatan Utama Hasil Kunjungan

Pemanfaatan utama hasil kunjungan ke PST BPS Kabupaten Barito Kuala menggambarkan tujuan utama pencarian atau konsultasi data yang dilakukan oleh konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala. Dalam SKD 2020, pemanfaatan utama dikelompokkan menjadi lima, yaitu Tugas Sekolah/Tugas Kuliah, Pemerintahan, Komersial, Penelitian, dan Lainnya. Sebagaimana terdapat pada Gambar 2.7, hasil SKD 2020 menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil kunjungan, baik kunjungan langsung maupun tidak langsung, ke PST BPS Kabupaten Barito Kuala cukup bervariasi. Walaupun demikian, hasil kunjungan ke PST BPS Kabupaten Barito Kuala paling banyak dimanfaatkan untuk Pemerintahan (80,65%). Pemanfaatan untuk Tugas Sekolah/Tugas Kuliah dan Penelitian memiliki persentase yang sama yaitu sebesar 9,68%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil kunjungan ke PST BPS Kabupaten Barito Kuala sangat dibutuhkan dalam bidang perencanaan di dalam pemerintahan. Tidak ada satupun yang dimanfaatkan untuk tujuan komersial.



Gambar 2.7. Persentase Konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala Menurut Pemanfaatan Utama Hasil Kunjungan

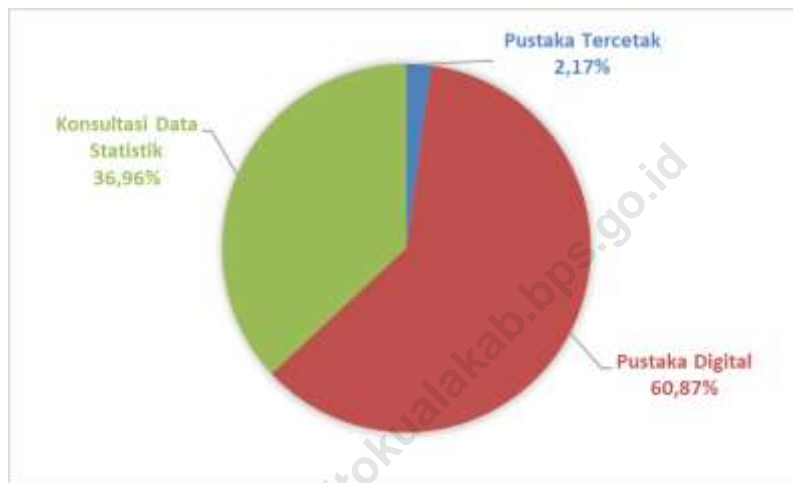
Merujuk pada Gambar 2.7, konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala didominasi oleh konsumen yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah (K/L/OPD). Sejalan dengan visi BPS 2020-2024, yaitu “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”, BPS menyediakan data statistik untuk mendukung Indonesia Maju, baik dalam tahap perencanaan, *monitoring*, maupun evaluasi pembangunan, terutama bagi pemerintahan. Berdasarkan hasil SKD 2020, 100% konsumen yang berasal dari K/L/OPD menggunakan data BPS untuk perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan. Oleh karena itu, data yang disediakan oleh BPS harus mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

2.4. Konsumen Menurut Jenis Layanan

Sesuai dengan peran BPS sebagai lembaga publik, BPS menyediakan berbagai jenis layanan data dan konsultasi statistik. Layanan tersebut meliputi Pustaka Tercetak, Pustaka Digital, Penjualan Publikasi, Data Mikro, Konsultasi Data Statistik, dan Rekomendasi Kegiatan Statistik.

Distribusi penggunaan jenis layanan di PST BPS Kabupaten Barito Kuala oleh konsumen dapat dilihat pada Gambar 2.8. Berdasarkan gambar tersebut, jenis

layanan yang paling banyak digunakan oleh konsumen adalah Pustaka Digital, yaitu sebesar 60,87%. Pada posisi kedua, Konsultasi Data Statistik dengan persentase sebesar 36,96%. Selain itu, Pustaka Tercetak digunakan sebesar 2,17%. Sementara itu, pada tahun 2020 tidak ada yang menggunakan layanan Penjualan Publikasi, Data Mikro, dan Rekomendasi Kegiatan Statistik.



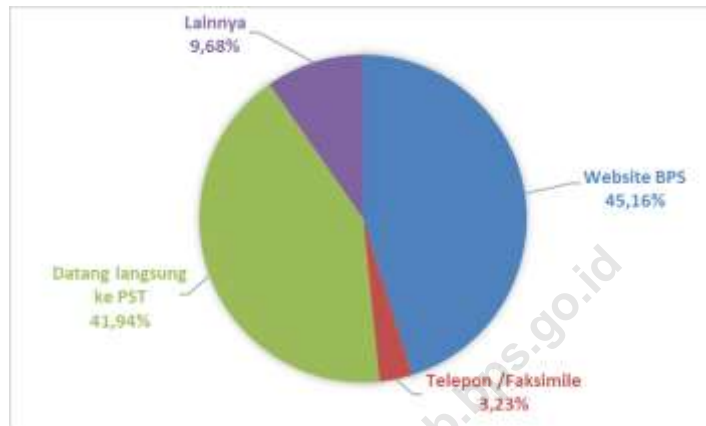
Gambar 2.8. Persentase Konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala Menurut Jenis Layanan

2.5. Konsumen Menurut Fasilitas Utama untuk Memperoleh Layanan BPS

Fasilitas utama yang digunakan untuk memperoleh layanan BPS juga ditanyakan kepada konsumen yang menjadi responden SKD 2020. Fasilitas tersebut meliputi *Website* BPS, Allstat BPS (aplikasi android dan iOS), Silastik (silastik.bps.go.id), Sirusa (sirusa.bps.go.id), Romantik Online (romantic.bps.go.id), telepon/faksimili, *e-mail*/surat, datang langsung ke PST, dan lainnya.

Berdasarkan Gambar 2.9, dapat dilihat bahwa sebagian besar konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala mendapatkan data melalui fasilitas *Website* BPS dengan persentase sebesar 45,16%. Hal ini mengindikasikan bahwa informasi yang tersedia pada *website* BPS sudah cukup memenuhi kebutuhan data konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala. Walaupun demikian, konsumen yang datang langsung ke PST BPS juga masih banyak dengan persentase 41,94%.

Sementara itu, fasilitas yang paling sedikit digunakan oleh konsumen untuk memperoleh data BPS di PST BPS Kabupaten Barito Kuala adalah melalui Telepon/Faksimili dan lainnya dengan persentase masing-masing 3,23%.



Gambar 2.9. Persentase Konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala Menurut Fasilitas Utama untuk Mendapatkan Layanan BPS

<https://baritokualakab.bps.go.id>

3

ANALISIS KEPUASAN LAYANAN



Indeks Kepuasan Konsumen
terhadap Pelayanan BPS



92,40





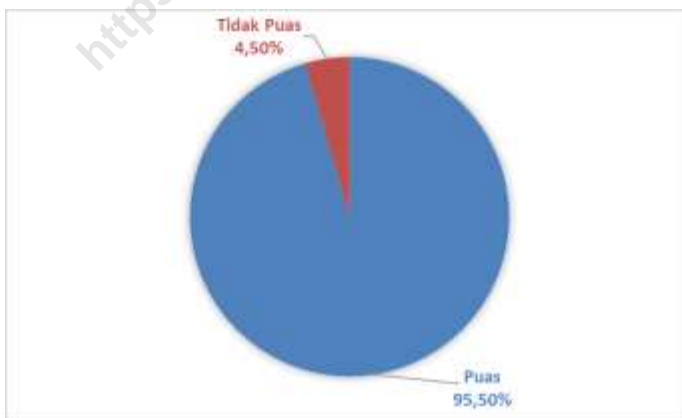
Bab 3

Analisis Kepuasan Layanan

Bab ini menjabarkan analisis mengenai kepuasan konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala terhadap pelayanan PST BPS Kabupaten Barito Kuala secara umum dan menurut atribut pelayanan. Analisis kepuasan layanan meliputi kepuasan konsumen terhadap pelayanan, akses, dan sarana prasarana, *gap analysis*, *Importance and Performance Analysis* (IPA), serta analisis Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap pelayanan BPS. Unit analisis yang digunakan adalah konsumen dengan satuan orang.

3.1. Kepuasan Konsumen Terhadap Pelayanan

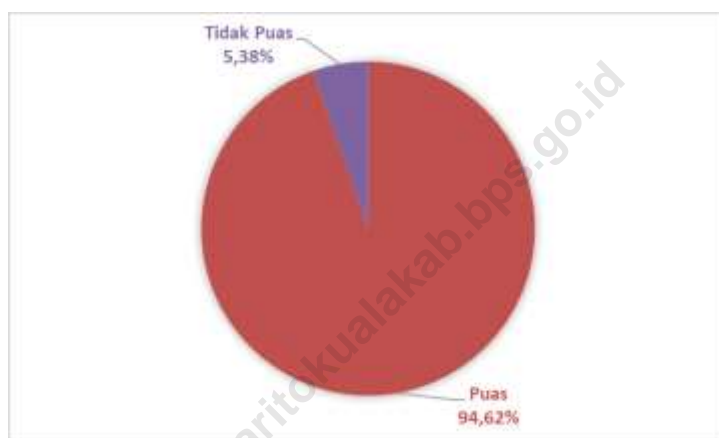
Keberhasilan pelayanan BPS dapat diukur dengan persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan BPS. Berdasarkan Gambar 3.1, persentase konsumen yang merasa puas dengan pelayanan BPS di PST BPS Kabupaten Barito Kuala sebesar 95,50%, sedangkan yang merasa tidak puas sebesar 4,50%.



Gambar 3.1. Persentase Kepuasan Konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala Terhadap Pelayanan

3.2. Kepuasan Konsumen Terhadap Akses Data

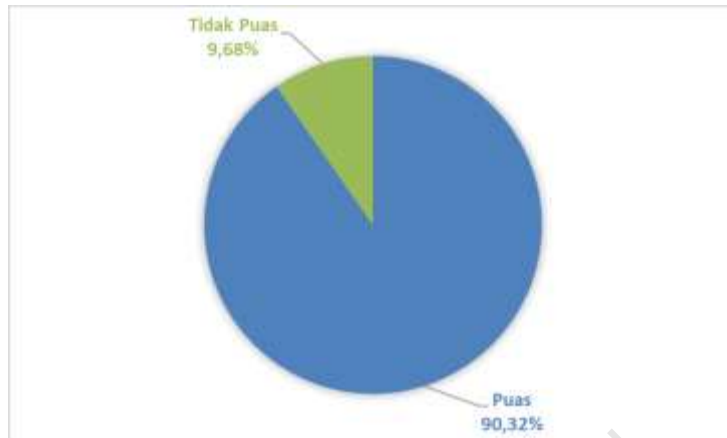
Kepuasan konsumen terhadap akses data BPS diperoleh dari atribut akses data BPS melalui fasilitas utama yang digunakan (sesuai Blok 1 Rincian 11), akses data pada *website* BPS, dan akses konten pada *website* BPS. Berdasarkan Gambar 3.3, persentase konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala yang puas terhadap akses data sebesar 94,62%, sedangkan 5,38% konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala merasa tidak puas dengan akses data.



Gambar 3.2. Persentase Kepuasan Konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala Terhadap Akses Data

3.3. Kepuasan Konsumen Terhadap Sarana dan Prasarana

Kepuasan konsumen terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS dapat diperoleh dari atribut kenyamanan sarana dan prasarana serta keberadaan fasilitas pengaduan. Berdasarkan Gambar 3.4, persentase konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala yang puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana sebesar 90,32%, sedangkan 9,68% konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala merasa tidak puas dengan pemenuhan sarana dan prasarana.

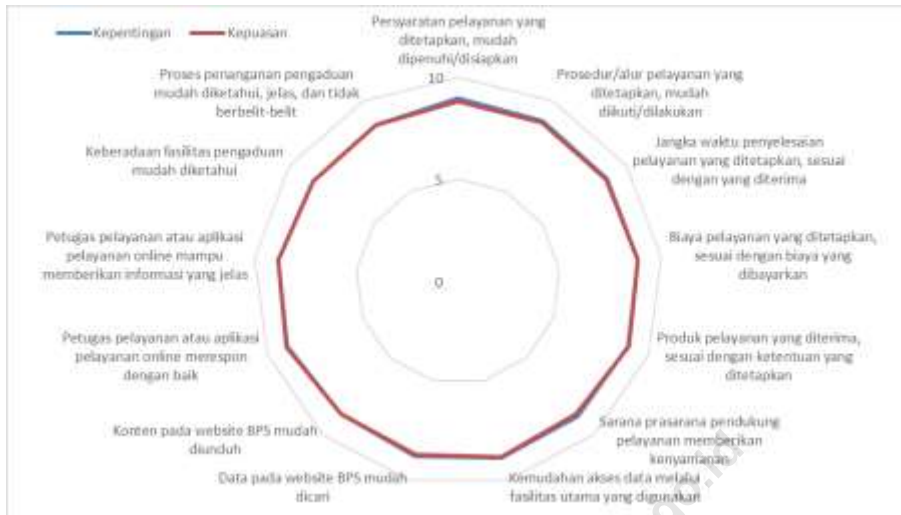


Gambar 3.3. Persentase Kepuasan Konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala Terhadap Sarana dan Prasarana

3.4. *Gap Analysis* Kepuasan Konsumen Terhadap Pelayanan BPS

Kepuasan konsumen terhadap pelayanan BPS tergantung pada kepentingan pelayanan BPS bagi konsumen tersebut. Artinya, seberapa penting suatu pelayanan bagi konsumen akan berpengaruh pada seberapa puas konsumen terhadap kualitas pelayanan tersebut. Pada bagian ini, akan dianalisis mengenai tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan BPS dengan menggunakan *gap analysis*. Konsumen yang dicakup dalam analisis ini adalah konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala yang memberikan penilaian puas dan sangat puas terhadap pelayanan BPS.

Gap analysis dapat menggambarkan kesenjangan antara harapan konsumen dengan kinerja pelayanan BPS di PST BPS Kabupaten Barito Kuala. Dalam *gap analysis*, upaya perbaikan kinerja pelayanan dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan. Berdasarkan Gambar 3.5, terlihat bahwa atribut pelayanan di PST BPS Kabupaten Barito Kuala memiliki nilai gap yang beragam, namun didominasi oleh gap negatif sebanyak 6 atribut artinya nilai harapan (kepentingan) lebih tinggi dari nilai persepsi (kepuasan).



Gambar 3.4. Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan, dan Gap Pelayanan BPS di PST BPS Kabupaten Barito Kuala

Gap masing-masing atribut pelayanan dapat dilihat dalam Tabel 3.1. Berdasarkan tabel tersebut, atribut Persyaratan pelayanan yang ditetapkan, mudah dipenuhi/disiapkan, sesuai dengan yang diterima memiliki nilai gap paling jauh yaitu -0,16. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja dari atribut tersebut masih belum memenuhi harapan konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala. Sementara itu, terdapat 5 atribut memiliki gap 0 yang artinya harapan dan persepsi konsumen sudah sesuai.

Atribut pelayanan di PST BPS Kabupaten Barito Kuala memiliki gap 0,03 sampai -0,16. Walaupun demikian, menurut Parsuraman (1991), jika gap negatif bernilai lebih besar dari -1, maka atribut pelayanan tersebut masih dalam kategori baik. Sehingga, dapat dikatakan bahwa atribut yang memiliki *gap* negatif walaupun belum dapat memenuhi harapan konsumen, namun masing-masing atribut pelayanan sudah memiliki kinerja yang cukup baik.

Tabel 3.1. Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan, dan Gap Pelayanan Menurut Atribut Pelayanan di PST BPS Kabupaten Barito Kuala

No.	Atribut Pelayanan	Kepentingan	Kepuasan	Gap
1.	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan, mudah dipenuhi/disiapkan	8,97	8,81	-0,16
2.	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan, mudah diikuti/dilakukan	8,87	8,81	-0,06
3.	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan, sesuai dengan yang diterima	8,87	8,81	-0,06
4.	Biaya pelayanan yang ditetapkan, sesuai dengan biaya yang dibayarkan	8,87	8,87	0,00
5.	Produk pelayanan yang diterima, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan	8,90	8,94	0,03
6.	Sarana prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan	8,81	8,68	-0,13
7.	Kemudahan akses data melalui fasilitas utama yang digunakan (sesuai Blok 1 Rincian 11)	8,87	8,84	-0,03
8.	Data pada <i>website</i> BPS mudah dicari	8,81	8,74	-0,06
9.	Konten pada <i>website</i> BPS mudah diunduh	8,68	8,68	0,00
10.	Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan <i>online</i> merespon dengan baik	8,97	9,00	0,03
11.	Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan <i>online</i> mampu memberikan informasi yang jelas	8,87	8,87	0,00
12.	Keberadaan fasilitas pengaduan mudah diketahui	8,65	8,65	0,00
13.	Proses penanganan pengaduan mudah diketahui, jelas, dan tidak berbelit-belit	8,67	8,67	0,00

3.5. *Importance and Performance Analysis (IPA) Terhadap Pelayanan BPS*

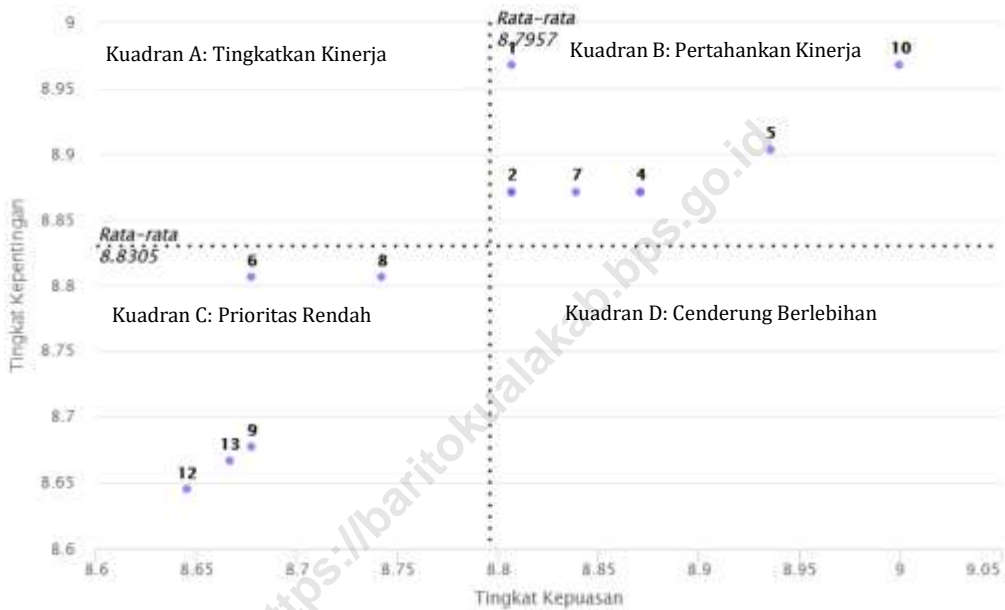
Bagian ini menganalisis kepuasan konsumen terhadap pelayanan BPS dalam rangka menentukan prioritas perbaikan kinerja pelayanan di PST BPS Kabupaten Barito Kuala. IPA menganalisis tingkat kesesuaian dengan membandingkan tingkat kepuasan dengan tingkat kepentingan. Selanjutnya, IPA

memetakan atribut pelayanan ke dalam empat kuadran yang dipisahkan oleh rata-rata tingkat kepentingan (harapan) pada sumbu Y dan rata-rata tingkat kepuasan (kinerja) pada sumbu X.

Tabel 3.2. Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan, dan Tingkat Kesesuaian Menurut Atribut Pelayanan di PST BPS Kabupaten Barito Kuala

No.	Atribut Pelayanan	Kepentingan	Kepuasan	Tingkat Kesesuaian (%)
1.	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan, mudah dipenuhi/disiapkan	8,97	8,81	101,82
2.	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan, mudah diikuti/dilakukan	8,87	8,81	100,68
3.	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan, sesuai dengan yang diterima	8,87	8,81	100,68
4.	Biaya pelayanan yang ditetapkan, sesuai dengan biaya yang dibayarkan	8,87	8,87	100,00
5.	Produk pelayanan yang diterima, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan	8,90	8,94	99,55
6.	Sarana prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan	8,81	8,68	101,50
7.	Kemudahan akses data melalui fasilitas utama yang digunakan (sesuai Blok 1 Rincian 11)	8,87	8,84	100,34
8.	Data pada <i>website</i> BPS mudah dicari	8,81	8,74	100,80
9.	Konten pada <i>website</i> BPS mudah diunduh	8,68	8,68	100,00
10.	Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan <i>online</i> merespon dengan baik	8,97	9,00	99,67
11.	Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan <i>online</i> mampu memberikan informasi yang jelas	8,87	8,87	100,00
12.	Keberadaan fasilitas pengaduan mudah diketahui	8,65	8,65	100,00
13.	Proses penanganan pengaduan mudah diketahui, jelas, dan tidak berbelit-belit	8,67	8,67	100,00

Tabel 3.2. menjelaskan tingkat kesesuaian antara kepuasan dan kepentingan dari responden menurut atribut pelayanan. Tingkat kesesuaian masing-masing atribut didominasi bernilai <100%. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa kinerja pelayanan di PST BPS Kabupaten Barito Kuala belum memenuhi harapan konsumen. Namun terdapat 5 atribut memiliki tingkat kesesuaian 100% sesuai dengan *gap analysis* di atas.



Keterangan

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan pelayanan yang ditetapkan, mudah dipenuhi/disiapkan 2. Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan, mudah diikuti/dilakukan 3. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan, sesuai dengan yang diterima 4. Biaya pelayanan yang dibayarkan, sesuai dengan biaya yang ditetapkan 5. Produk pelayanan yang diterima, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 6. Sarana prasarana pelayanan memberikan kenyamanan | <ol style="list-style-type: none"> 7. Data BPS mudah diakses melalui fasilitas utama yang digunakan 8. Data pada <i>website</i> BPS mudah dicari 9. Konten pada <i>website</i> BPS mudah diunduh 10. Petugas pelayanan/aplikasi pelayanan <i>online</i> merespon dengan baik 11. Petugas pelayanan/aplikasi pelayanan <i>online</i> mampu memberikan informasi yang jelas 12. Keberadaan fasilitas pengaduan mudah diketahui 13. Proses penanganan pengaduan mudah diketahui, jelas, dan tidak berbelit-belit |
|--|--|

Gambar 3.5. *Importance and Performance Analysis* (IPA) Pelayanan di PST BPS Kabupaten Barito Kuala

Kuadran A memetakan atribut pelayanan yang memiliki nilai harapan lebih dari rata-rata harapan tetapi nilai kinerja kurang dari rata-rata kinerja. Oleh karena itu, atribut pelayanan yang berada pada kuadran A menjadi prioritas utama perbaikan. Berdasarkan Gambar 3.6, tidak ada atribut pelayanan yang menjadi prioritas utama perbaikan oleh PST BPS Kabupaten Barito Kuala.

Kuadran B memetakan atribut pelayanan yang memiliki nilai harapan dan nilai kinerja lebih dari rata-rata. Oleh karena itu, atribut pelayanan yang berada pada kuadran B sudah dapat memenuhi harapan pengguna sehingga perlu dipertahankan kinerjanya. Berdasarkan Gambar 3.6, atribut pelayanan yang perlu dipertahankan kinerjanya oleh PST BPS adalah:

1. Persyaratan pelayanan yang ditetapkan, mudah dipenuhi/disiapkan
2. Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan, mudah diikuti/dilakukan
3. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan, sesuai dengan yang diterima
4. Biaya pelayanan yang dibayarkan, sesuai dengan biaya yang ditetapkan
5. Produk pelayanan yang diterima, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
6. Data BPS mudah diakses melalui fasilitas utama yang digunakan
7. Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan *online* merespon dengan baik
8. Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan *online* mampu memberikan informasi yang jelas

Kuadran C memetakan atribut pelayanan yang memiliki nilai harapan dan nilai kinerja di bawah rata-rata. Oleh karena itu, atribut pelayanan yang berada pada kuadran C perlu diperbaiki namun prioritasnya lebih rendah dibandingkan atribut pelayanan yang berada pada kuadran A. Berdasarkan Gambar 3.6, atribut pelayanan yang harus diperbaiki dengan prioritas rendah oleh PST BPS adalah:

1. Sarana prasarana pelayanan memberikan kenyamanan
2. Data pada *website* BPS mudah dicari
3. Konten pada *website* BPS mudah diunduh
4. Keberadaan fasilitas pengaduan mudah diketahui. Contoh fasilitas pengaduan: kotak pengaduan, *website* pengaduan, dll.

5. Proses penanganan pengaduan mudah diketahui, jelas, dan tidak berbelit-belit.

Kuadran D memetakan atribut pelayanan yang memiliki nilai harapan di bawah rata-rata harapan tetapi kinerja di atas rata-rata kinerja. Oleh karena itu, atribut pelayanan yang berada pada kuadran D sudah melebihi harapan konsumen. Berdasarkan Gambar 3.6, tidak ada atribut pelayanan PST BPS Kabupaten Barito Kuala yang termasuk dalam kuadran D.

3.6. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Terhadap Pelayanan BPS

Indeks Kepuasan Konsumen (IKK)/*Customer Satisfaction Index*(CSI) digunakan untuk mendapatkan gambaran tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPS. Nilai IKK untuk PST BPS Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 sebesar 92,40, yang artinya kualitas pelayanan PST BPS Kabupaten Barito Kuala masuk kategori Baik.

<https://baritokualakab.bps.go.id>

4

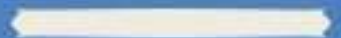
ANALISIS PERILAKU ANTI KORUPSI



Indeks Perilaku
Anti Korupsi



91,78





Bab 4

Analisis Perilaku Anti Korupsi

Bab ini menjabarkan analisis mengenai persepsi atau penilaian konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala terhadap perilaku anti korupsi pelayanan PST BPS Kabupaten Barito Kuala. Analisis perilaku anti korupsi meliputi penerapan perilaku anti korupsi dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Unit analisis yang digunakan adalah konsumen dengan satuan orang.

4.1. Penerapan Perilaku Anti Korupsi Pada Pelayanan BPS

Penilaian penerapan perilaku anti korupsi dapat dilihat berdasarkan atribut anti korupsi. Terdapat empat atribut atau unsur anti korupsi yang dicakup, yaitu tidak ada diskriminasi dalam pelayanan, tidak ada penerimaan imbalan di luar ketentuan yang berlaku dalam pelayanan, tidak ada pungutan liar (pungli) dalam pelayanan, dan tidak ada praktik percaloan dalam pelayanan.

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) digunakan untuk mendapatkan gambaran persepsi pengguna data terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan BPS. Indeks ini diperoleh dengan membandingkan harapan dan penilaian dari 4 atribut anti korupsi. Berdasarkan Gambar 4.1, IPAK pelayanan BPS di PST BPS Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2020 sebesar 91,78. Artinya, perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan BPS di PST BPS Kabupaten Barito Kuala.

<https://baritokualakab.bps.go.id>

5

ANALISIS KEBUTUHAN DATA



Level Data

78,79%
Kabupaten/Kota

100%
Tahunan

Periode Data

Perolehan Data

100%
Diterima dan sesuai





Bab 5

Analisis Kebutuhan Data

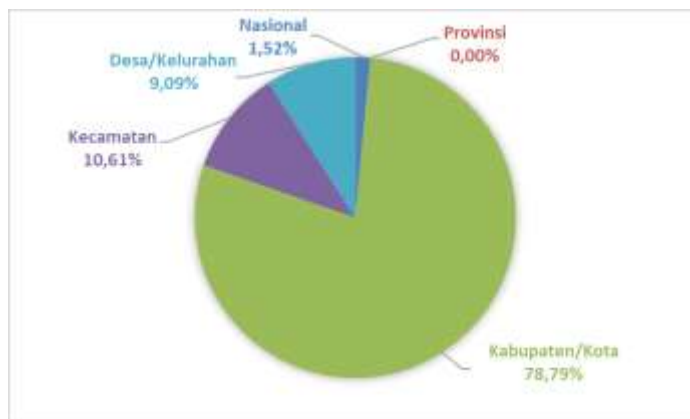
Bab ini menjabarkan analisis mengenai kebutuhan data dari konsumen. Analisis tersebut meliputi jenis data, level data, periode data, dan perolehan data. Selain itu, analisis dilakukan terhadap jenis data dan publikasi yang paling banyak dicari oleh konsumen.

Terdapat dua pendekatan kewilayahan yang digunakan dalam bab ini, yaitu wilayah PST BPS Kabupaten Barito Kuala dan wilayah penyedia data BPS Kabupaten Barito Kuala. Wilayah PST BPS Kabupaten Barito Kuala digunakan untuk menganalisis jenis, level, dan periode dari data yang dicari oleh konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala. Sementara itu, wilayah penyedia data BPS Kabupaten Barito Kuala digunakan untuk menganalisis perolehan data yang berasal dari BPS Kabupaten Barito Kuala. Unit analisis yang digunakan adalah konsumen dengan satuan orang-data.

Orang-data adalah pasangan satu-satu antara setiap konsumen (orang) dengan jenis data yang dicari (data). Misalnya, seorang pengguna data mencari lima jenis data, maka dihitung lima orang-data. Ketika mencari data, konsumen bisa mencari lebih dari satu *series* data untuk jenis data yang sama. Sehingga, jika konsumen mencari satu jenis data sebanyak sepuluh tahun, orang tersebut akan dihitung sebagai satu konsumen dan sepuluh orang-data.

5.1. Kebutuhan Data Data Menurut Level Data

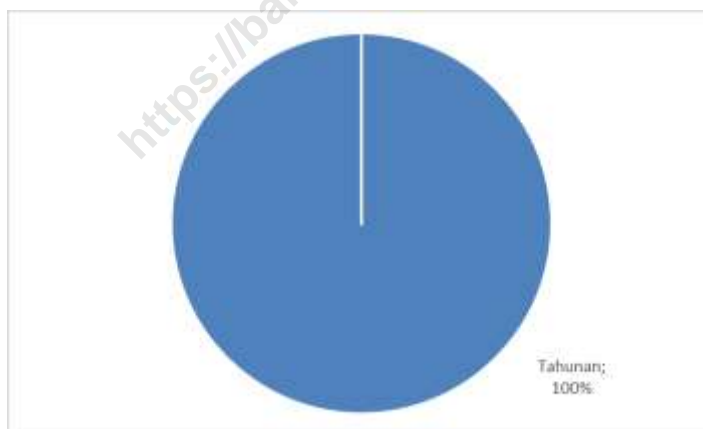
Dari hasil SKD 2020, dapat diidentifikasi tingkat penyajian data (level data) yang dibutuhkan oleh konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala. Secara umum, dari 66 orang-data, 1,52% mencari data pada level nasional. Data selanjutnya adalah data level kabupaten/kota (78,79%), data level kecamatan (10,61%), dan data level Desa/Kelurahan (9,09%). Adapun sebaran pencarian data menurut level data secara lengkap ditunjukkan dalam Gambar 5.1.



Gambar 5.1. Persentase Pencarian Data di PST BPS Kabupaten Barito Kuala Menurut Level Data

5.2. Kebutuhan Data Menurut Periode Data

Periode data dalam SKD terdiri dari periode data sepuluh tahunan, lima tahunan, tiga tahunan, tahunan, semesteran, triwulanan, bulanan, mingguan, harian, dan lainnya. Gambar 5.2 menunjukkan bahwa data periode tahunan merupakan data yang selalu dicari dengan persentase mencapai 100%.

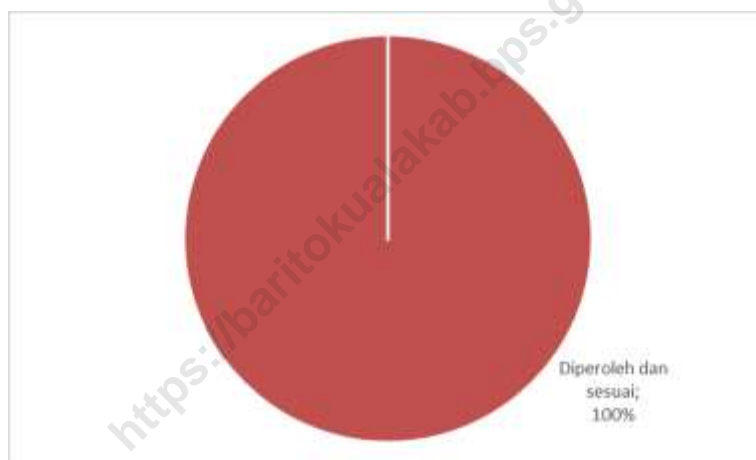


Gambar 5.2. Persentase Pencarian Data di PST BPS Kabupaten Barito Kuala Menurut Periode Data

5.3. Kebutuhan Data menurut Jenis Perolehan Data

Dalam pencarian data, konsumen tidak selalu memperoleh data yang dicari. SKD 2020 membagi jenis perolehan data menjadi empat, yaitu diperoleh dan sesuai,

diperoleh tapi tidak sesuai, tidak diperoleh, dan belum diperoleh. Jenis perolehan diperoleh dan sesuai memiliki arti bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan konsumen, sedangkan diperoleh tapi tidak sesuai berarti data yang diperoleh hanya memenuhi sebagian kebutuhan konsumen atau menjadi pengganti data yang sebenarnya dibutuhkan konsumen. Jenis perolehan tidak diperoleh berarti bahwa data yang dicari benar-benar tidak diperoleh. Sementara itu, belum diperoleh memiliki makna bahwa pencarian data belum selesai dilakukan sehingga data yang dibutuhkan belum diperoleh. Analisis berikut menjelaskan jenis perolehan data BPS di Kabupaten Barito Kuala.



Gambar 5.3. Persentase Pencarian Data di PST BPS Kabupaten Barito Kuala Menurut Perolehannya

Berdasarkan Gambar 5.3, dari seluruh pencarian data, 100% memperoleh data sesuai yang dengan kriteria yang dibutuhkan.

<https://baritokualakab.bps.go.id>



ANALISIS KEPUASAN KUALITAS DATA



Kepuasan Konsumen
terhadap Data yang Diperoleh



98,28%

konsumen merasa **puas**





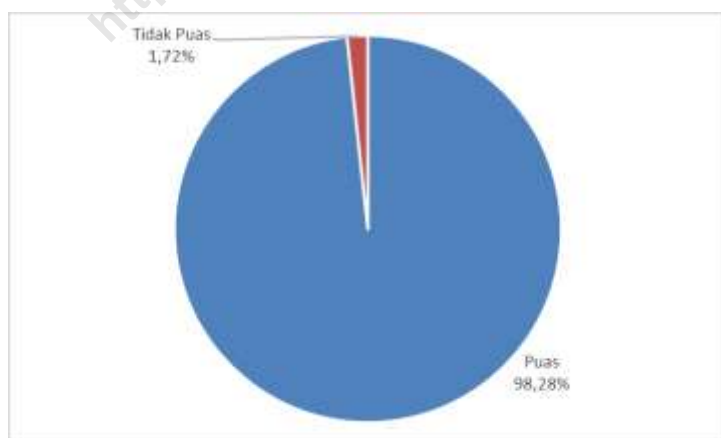
Bab 6

Analisis Kepuasan Kualitas Data

Bab ini menjabarkan analisis mengenai kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang diperoleh dari penyedia data BPS Kabupaten Barito Kuala. Analisis tersebut meliputi kepuasan konsumen terhadap kualitas data secara umum serta menurut aspek (atau dimensi) kualitas data. Selain itu, analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap kualitas data BPS. Unit analisis yang digunakan adalah konsumen dengan satuan orang-data.

6.1. Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Data BPS

Kepuasan konsumen terhadap data yang diperoleh dari penyedia data BPS Kabupaten Barito Kuala disajikan dalam Gambar 6.1. Berdasarkan gambar tersebut, secara umum, konsumen merasa puas dengan data yang disediakan oleh BPS Pusat dengan persentase mencapai 98,28%.

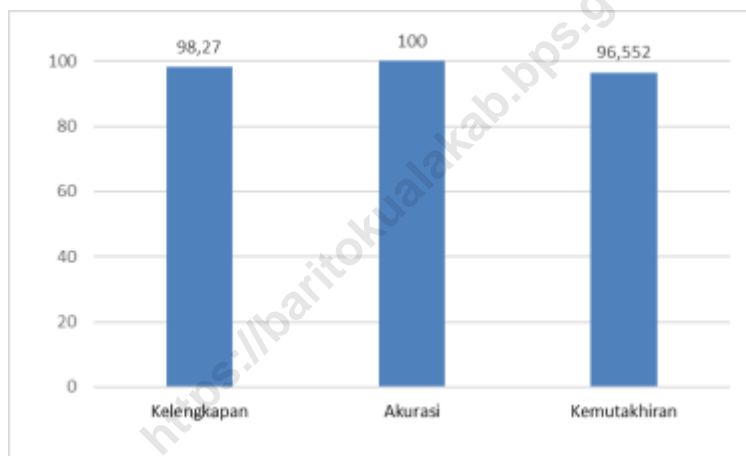


Gambar 6.1. Persentase Kepuasan Konsumen Terhadap Data yang Diperoleh dari Penyedia Data BPS Kabupaten Barito Kuala

Aspek Kualitas Data

Kepuasan konsumen terhadap data yang diperoleh dari penyedia data BPS Kabupaten Barito Kuala disajikan menurut aspek kualitas data. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat kepuasan konsumen terhadap masing-masing aspek dalam rangka peningkatan kualitas data yang disediakan oleh BPS Kabupaten Barito Kuala.

Berdasarkan Gambar 6.2, lebih dari 96,5% konsumen merasa puas terhadap data yang diperoleh pada masing-masing aspek kualitas data. Akurasi menjadi dimensi kualitas data dengan persentase kepuasan paling tinggi (100%).



Gambar 6.2. Persentase Kepuasan Konsumen Terhadap Data yang Diperoleh dari Penyedia Data BPS Pusat Menurut Aspek Kualitas Data

6.2. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Terhadap Kualitas Data BPS

Indeks Kepuasan Konsumen (IKK)/*Customer Satisfaction Index* (CSI) digunakan untuk mendapatkan gambaran tingkat kepuasan konsumen terhadap Kualitas Data BPS dari Penyedia Data BPS Kabupaten Barito Kuala. Nilai IKK untuk PST BPS Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 sebesar 87,97, yang artinya kualitas pelayanan PST BPS Kabupaten Barito Kuala masuk kategori Baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala merasa puas

terhadap data yang dicari dengan data yang diperoleh dari PST BPS Kabupaten Barito Kuala.

<https://baritokualakab.bps.go.id>

<https://baritokualakab.bps.go.id>

7

PENUTUP





Bab 7 Penutup

7.1. Kesimpulan

Tingkat kebutuhan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS diidentifikasi melalui kegiatan SKD. Identifikasi tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi statistik serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Sejak tahun 2005, SKD rutin dilaksanakan secara tahunan. Tahun 2020, SKD dilaksanakan di 514 wilayah PST yang mencakup BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, dan 480 BPS Kabupaten/Kota selama bulan Februari-Agustus 2020.

Secara umum, pelaksanaan SKD 2020 di PST BPS Kabupaten Barito Kuala berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan realisasi pengumpulan data yang sesuai target, yaitu 103,33 persen.

Hasil SKD 2020 dianalisis untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik konsumen, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif melalui table dan grafik, analisis tabulasi silang, analisis *gap*, *Importance and Performance Analysis* (IPA), dan *Customer Satisfaction Index* (CSI).

Berdasarkan hasil analisis SKD 2020, dapat diambil kesimpulan:

1. Konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala didominasi oleh konsumen yang berasal dari Pemerintah Daerah (51,61 persen) dengan pemanfaatan terbesar digunakan untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan (80,65 persen). Sebagian besar konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala adalah lulusan D4/S1 (45,16 persen). Hal tersebut diperkuat dengan persentase pekerjaan utama konsumen terbesar adalah PNS/TNI/Polri (61,29 persen).

2. Konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala cenderung menggunakan layanan yang menyediakan data dan informasi statistik dalam bentuk digital atau *softcopy*. Hal tersebut ditunjukkan dengan jenis layanan yang paling sering digunakan oleh konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala adalah layanan data Pustaka Digital (60,87 persen). Kecenderungan tersebut juga diperkuat dengan persentase fasilitas utama untuk memperoleh data BPS terbesar adalah *website* BPS (45,16 persen).
3. Sebagian besar konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala menggunakan data BPS sebagai data utama untuk kegiatan yang dilakukan. Dengan kata lain, BPS menjadi rujukan utama bagi konsumen dalam memperoleh data. Hal tersebut ditunjukkan dengan persentase sebesar 90,32 persen.
4. Level dan periode data yang dicari oleh konsumen di PST BPS Kabupaten Barito Kuala beragam. Level Kabupaten/Kota merupakan level data yang paling banyak diperoleh konsumen (78,79 persen). Sementara itu, periode tahunan merupakan periode data yang selalu dicari oleh konsumen (100 persen). Semua data diperoleh dan sesuai yang dibutuhkan konsumen (100 persen).
5. Secara umum, konsumen merasa puas terhadap data yang diperoleh dari penyedia data BPS Kabupaten Barito Kuala yang ditunjukkan dengan persentase kepuasan sebesar 98,28 persen.
6. Kepuasan konsumen terhadap data yang diperoleh dari penyedia data BPS Kabupaten Barito Kuala disajikan menurut dimensi kualitas data, yaitu kelengkapan data, akurasi data, dan kemitakhiran data. Kualitas data dari ketiga dimensi tersebut bernilai lebih dari 96,5 persen.
7. Konsumen yang merasa puas dengan pelayanan di PST BPS Kabupaten Barito Kuala yang ditunjukkan dengan persentase kepuasan sebesar 92,40 persen. Masih terdapat *gap* antara tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Kabupaten Barito

Kuala. Walaupun demikian, masing-masing atribut pelayanan sudah memiliki kinerja yang cukup baik.

Kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Kabupaten Barito Kuala digambarkan melalui IKK. Nilai IKK PST BPS Kabupaten Barito Kuala adalah 87,97. Artinya kualitas pelayanan di PST BPS Kabupaten Barito Kuala berkategori baik. Sedangkan IPAK PST BPS Kabupaten Barito Kuala adalah 91,78. Artinya perilaku anti korupsi sangat diterapkan.

7.2. Saran dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis SKD 2020 dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi statistic serta memberikan pelayanan public yang lebih baik adalah:

1. IPA memetakan 13 atribut pelayanan ke dalam 4 kuadran yang dipisahkan oleh rata-rata tingkat kepentingan pada sumbu Y dan rata-rata tingkat kepuasan pada sumbu X. Berdasarkan hasil IPA, 3 atribut pelayanan di PST BPS Kabupaten Barito Kuala perlu diperbaiki dengan prioritas perbaikan rendah (kuadran C), yaitu:
 - a. Sarana prasarana pelayanan memberikan kenyamanan
 - b. Data pada website BPS mudah dicari
 - c. Konten pada website BPS mudah diunduh
 - d. Keberadaan fasilitas pengaduan mudah diketahui. Contoh fasilitas pengaduan: kotak pengaduan, website pengaduan, dll.
 - e. Proses penanganan pengaduan mudah diketahui, jelas, dan tidak berbelit-belit.
2. Perbedaan metode perhitungan kepuasan konsumen pada tahun 2020 ini memberikan dampak pada besaran angka kepuasan. Hal ini sebaiknya dikurangi agar angka yang dihasilkan dapat dibandingkan antar tahun.
3. Atribut pelayanan yang digunakan pada kuesioner SKD 2021 sebaiknya tidak mengalami perubahan dari SKD 2020 agar dapat dibandingkan antar atribut tiap tahun.

<https://baritokualakab.bps.go.id>



Daftar Pustaka

- Brandt, R.D. 2000. An 'Outside-In' Approach to Determining Customer-Driven Priorities for Improvement and Innovation. Burke White Paper Series, Vol. 2, Issue 2, pp. 1-8.
- Deng, Jinyang dan Chad D. Pierskalla. 2018. Linking Importance-Performance Analysis, Satisfaction, and Loyalty. A Study of Savannah, GA." Sustainability, ISSN 2071-1050. DOI:10.3390/su10030704.
- Latu, TM & Everett, AM. 2000. Review of Satisfaction Research and measurement Approaches. Science & Research Internal Report 183. New Zealand: Departement of Conservation.
- Martilla, JA, & James, JC. 1977. Importance-Performance Analysis. Journal of Marketing, 41(1), 13-17.
- Martinez, CL. 2003. Evaluation Report: Tools Cluster Networking Meeting #1. Arizona: CenterPoint Institute Inc.
- Parasuraman, A. Valerie. 2001. Delivering Quality Service. New York: The Free Press.
- Poliakova, Adela. 2010. Application of the customer satisfaction index (CSI) to transport services. Electronical Technical Journal of Technology, Engineering, and Logistics in Transport, Number IV, Volume V, December 2010. ISSN 1801-674X.
- Samuel, Hatane & Foedjiawati. 2005. Pengaruh Kepuasan Konsumen terhadap Kesetiaan Merek (Studi Kasus Restoran The Prime Steak & Ribs Surabaya). Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol 7, No 1.
- Transportation Research Board. 1999. A Handbook for Measuring Customer Satisfaction and Service Quality. Washington DC: National Academy Press.



LAMPIRAN

Blok II. Kepuasan terhadap Layanan Data dan Informasi Statistik BPS											
Menurut pendapat Saudara, bagaimana tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan Saudara pada rincian pelayanan berikut?											
Langkari angka yang Saudara pilih sesuai skala berikut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10											
Sangat Tidak Penting/Puas		Tingkat Kepentingan		Tingkat Kepuasan							
No	Rincian Pelayanan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan, mudah dipenuhi/ditanyakan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Prosedur/jalur pelayanan yang ditetapkan, mudah dilihni/ditanyakan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan, sesuai dengan yang ditrima.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Biaya pelayanan yang dibayarkan, sesuai dengan biaya yang ditetapkan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Produk pelayanan yang ditrima, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Sarana prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Data BPS mudah diakses melalui fasilitas utama yang digunakan (sesuai Blok I Rincian 11).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Data pada website BPS mudah dicari. ¹⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Konten pada website BPS mudah dipahami. ²⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan online merespon dengan baik.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan online mampu memberikan informasi yang jelas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Keberadaan fasilitas pengaduan mudah diketahui. Contoh fasilitas pengaduan: kotak pengaduan, website pengaduan, dll.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Proses penanganan pengaduan mudah diketahui, jelas dan tidak berbelit-belit. ³⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Tidak ada pemertinaan imbalan di luar ketentuan yang berlaku dalam pelayanan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Tidak ada pungutan luar (pungli) dalam pelayanan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Tidak ada praktik percaloan dalam pelayanan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹⁾ Mudah hingga lha tidak menggunakan website BPS.

²⁾ Mudah hingga lha tidak pernah melakukan pengaduan.

Blok III. Kebutuhan Data												
Data jika kode 3, 2, 6, 8 dan/atau 16 pada Blok I/Blokas 10 diingkari												
Tentukan informasi mengenai data-data yang dibutuhkan/dikonstruksikan dari BPS serta tingkat kegunaan terhadap masing-masing data tersebut.												
No.	Data yang Dibutuhkan/Dikonstruksikan			Apakah data pada kolom (2) - (5) sudah diperoleh?			Disi jika kolom (6) berkode 1 atau 2					
	Jenis Data (Tentukan jenis data-kategori wilayah dimana Batas Keperluan Perantara Bergejala, Ketersediaan/ Ketersediaan Jemput, dll)	Tahun Data	Level Data ¹⁾	Periode Data ²⁾	Jenis Sumber Data (1)Praktis (2)Data Mikro (3)Fakta (4)Tahapan Data (5)Tabel & Website	Sumber Data Judul Sumber Data (1)Mod. Perantara pada Dalam Angkut, Perantara Data, Indikator BPS Perantara pada Perantara Indikator per Kabupaten, dll	Tahun Sumber Data	Tingkat kegunaan ³⁾ Tingkat kegunaan terhadap jenis data yang diperoleh 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bergitu besar plus Kekelengkapan Akurasi Data, Kemutakhiran Data	Tingkat kegunaan ⁴⁾ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bergitu besar plus Kekelengkapan Akurasi Data, Kemutakhiran Data			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
¹⁾ Kode level data berikut (1)	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kabupaten/kota 4. Kecamatan	5. Desa/kelurahan 6. Indritin	7. Lainnya (sebutkan)	7. Lainnya (sebutkan)	²⁾ Deduksi kolom (10) - (11) Kekelengkapan Akurasi Kemutakhiran Kualitas Data	³⁾ Deduksi kolom (10) - (11) Kekelengkapan Akurasi Kemutakhiran Kualitas Data						
²⁾ Kode periode data berikut (5)	1. Setiap tahunan 2. Lima tahunan 3. Tiga tahunan	7. Bulanan 8. Mingguan 9. Harian	10. Lainnya (sebutkan)	10. Lainnya (sebutkan)								
³⁾ Kode level data berikut (1)	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kabupaten/kota 4. Kecamatan	5. Desa/kelurahan 6. Indritin	7. Lainnya (sebutkan)	7. Lainnya (sebutkan)								
⁴⁾ Kode periode data berikut (5)	1. Setiap tahunan 2. Lima tahunan 3. Tiga tahunan	7. Bulanan 8. Mingguan 9. Harian	10. Lainnya (sebutkan)	10. Lainnya (sebutkan)								

Blok IV. Catatan

Tuliskan kritik dan saran terhadap produk dan layanan data/informasi statistik yang disediakan oleh BPS.

<https://baritokualakab.bps.go.id>

Lampiran 2. Indikator Analisis Segmentasi Utama

a. Persentase konsumen menurut Wilayah PST dan Kelompok Umur

Satker PST	Kelompok Umur						
	< 16	16- 25	26- 35	36 - 45	46 - 55	56 - 65	> 65
Kabupaten Barito Kuala	0	12,90	25,81	38,71	12,90	9,68	0

b. Persentase konsumen menurut Wilayah PST dan Jenis Kelamin

Satker PST	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Kabupaten Barito Kuala	48,39	51,61

c. Persentase konsumen menurut Wilayah PST dan Pendidikan Tinggi yang Diamatkan

Satker PST	Pendidikan Tinggi yang Diamatkan				
	≤ SLTA/Sederajat	D1/D2/D3	D4/S1	S2	S3
Kabupaten Barito Kuala	32,26	6,45	45,16	16,13	0

d. Persentase konsumen menurut Wilayah PST dan Pekerjaan Utama

Pekerjaan Utama	Satker PST
	Kabupaten Barito Kuala
Pelajar/Mahasiswa	9,68
Peneliti/Dosen	0
PNS/TNI/Polri	61,29
Pegawai BUMN/D	0
Pegawai Swasta	3,23
Wiraswasta	6,45
Pekerjaan Utama Lainnya	19,35

e. Persentase konsumen menurut Wilayah PST dan Instansi/institusi

Instansi/Institusi	Satker PST
	Kabupaten Barito Kuala
Lembaga Pendidikan & Penelitian Dalam Negeri	9,68
Lembaga Pendidikan & Penelitian Luar Negeri	0
Kementerian & Lembaga Pemerintah	25,81
Lembaga Internasional	0
Media Massa	0
Pemerintah Daerah	51,61
Perbankan	0
BUMN/BUMD	0
Swasta Lainnya	9,68

f. Persentase konsumen menurut Wilayah PST dan Pemanfaatan Hasil Kunjungan

Satker PST	Pemanfaatan Hasil Kunjungan		
	Pemerintah	Penelitian	Tugas Sekolah/ Kuliah
Kabupaten Barito Kuala	80,65	9,68	9,68

g. Persentase konsumen menurut Wilayah PST dan Jenis Layanan yang digunakan

Instansi/Institusi	Satker PST
	Kabupaten Barito Kuala
Pustaka Tercetak	2,17
Pustaka Digital	60,87
Penjualan Publikasi	0
Data Mikro	0
Konsultasi Statistik	36,96
Rekomendasi Kegiatan Statistik	0

h. Persentase konsumen menurut Wilayah PST dan Fasilitas Utama yang Digunakan untuk Memperoleh Data

Instansi/Institusi	Satker PST
	Kabupaten Barito Kuala
Website BPS	45,16
AllstatsBPS	0
Silastik	0
Sirusa	0
Romantik Online	0
Telepon/Faximilie	3,23
e-Mail/Surat	0
Datang Langsung ke PST	41,94
Fasilitas Lainnya	9,68

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BARITO KUALA

BPS-Statistics of Barito Kuala Regency

Jl. Jenderal Sudirman No. 72, Marabahan 70513

Telp. (0511) 4799057, Fax. (0511) 4799057

Email: bps8304@bps.go.id

Homepage: <http://baritokualakab.bps.go.id>